

SOSIOKONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Volume 18, No. 03, September - Desember 2013

ISSN 2089-0338 Nomor Akreditasi: 550/AU2/P2MI-LIPI/06/2013

DAFTAR ISI	Halaman
■ EDITORIAL	i
■ STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN (STUDI KASUS DI NANUSA, NATUNA DAN NUNUKAN)	255 - 278
Mira, Akhmad Solihin, dan Tajerin	
■ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESISTENSI PSIKOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN DI KALANGAN PENDULANG INTAN TRADISIONAL DI CEMPAKA, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN	279 - 290
Silvia Kristanti Tri Febriana, Dwi Nurrachmah, dan Emma Yuniarrahmah	
■ SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH DI TELUKNAGA, TANGERANG, BANTEN	289 - 302
Nini Kusriani, Siti Amanah, dan Anna Fatchiya	
■ PERSEPSI PETANI TERHADAP PERANAN PENYULUH PERTANIAN DI DESA SIDOMULYO DAN MUARI, DISTRIK ORANSBARI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	303 - 314
Krisnawati, Ninuk Purnaningsih, dan Pang Asngari	
■ IMPLEMENTASI MODEL PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PASCA-KONFLIK SOSIAL DI KOTA AMBON	315- 330
C. Elly Kumari Tjahya Putri dan Sri Yuni Murtiwiidayanti	
■ ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL BERBASIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI YOGYAKARTA	331 - 344
Wasisto Raharjo Jati	
■ SIKAP SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	345 - 366
Chatarina Rusmiyati dan Eny Hikmawati	
■ INDEKS	367 - 368

EDITORIAL

Pada SOSIOKONSEPSIA Volume 18 Nomor 03 Tahun 2013 ini, isu kemiskinan di Indonesia masih menjadi tema utama, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, pesisir, kawasan pertambangan dan daerah pertanian. Tulisan-tulisan tersebut menarik untuk dibaca, dan sebagai bahan kepustakaan terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat.

Penduduk Natuna, Nunukan dan Nanusa merupakan penduduk yang mendiami wilayah pesisir, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan. Mereka menghadapi berbagai permasalahan untuk melepaskan ketidakberdayaannya disebabkan produktivitas hasil tangkapan yang rendah. Pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada para nelayan tersebut, seperti bantuan modal usaha dan pendampingan.

Permasalahan juga dihadapi oleh para pendulang intan tradisional di Kalimantan Selatan. Para pendulang di Banjarbaru Kalimantan Selatan mengalami resistensi psikologis terhadap perubahan mata pencaharian disebabkan oleh persepsinya tentang mata pencaharian itu sendiri.

Wilayah pesisir pada umumnya mengalami kerusakan sumber daya alami dan rentan dengan perubahan iklim dan bencana alam, tidak terkecuali di Tangerang Banten. Merespon kondisi tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sejak tahun 2011. Hadirnya program tersebut telah mendapatkan respon yang positif oleh masyarakat, sehingga program dapat memberikan manfaat secara optimal.

Keberhasilan program yang diluncurkan ke masyarakat, tidak lepas dari peranan penyuluh dan persepsi petani terhadap penyuluh itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa persepsi petani di Manokwari Selatan terhadap penyuluh dikategorikan baik, sehingga program pertanian memberikan hasil bagi para petani.

Bentuk komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, yang diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program tersebut telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan diharapkan mampu menjadi salah satu strategi percepatan penurunan angka kemiskinan di DI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PNPM yang dilaksanakan sudah membantu manajemen ekonomi masyarakat lokal.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, permasalahan yang dibahas di dalam nomor ini adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Lembaga merupakan tempat yang memberikan pelayanan bagi anak-anak yang mengalami masalah sosial. Peranan LPA ini sangat penting, dalam hal meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak. Merespon dinamika yang terjadi di masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan model LPA yang responsif dan berpihak terhadap pemenuhan hak-hak anak seperti yang diujicobakan di Kota Ambon.

Permasalahan sosial yang akhir-akhir ini yang cenderung semakin meningkat yaitu kasus Tidak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan domestik. Masyarakat di Kota Pontianak sesungguhnya sudah mengetahui regulasi yang berkenaan dengan KDRT. Namun demikian, masyarakat belum ada keberanian untuk melakukan tindakan pencegahan, agar KDRT tersebut tidak terjadi.

REDAKSI

SOSIOKONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Mira (Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)

Akhmad Solihin (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor)

Tajerin (Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)

STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN (STUDI KASUS DI NANUSA, NATUNA DAN NUNUKAN)

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, Desember 2013, hlm: 255 - 278.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu, permasalahan dan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan berbasis sektor kelautan dan perikanan telah dilakukan di Natuna, Nunukan, dan Nanusa pada tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat kualitatif yang dikumpulkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik LFA (*Logical Framework Analysis*) untuk memetakan permasalahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, teknik SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) untuk merumuskan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan, dan teknik QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*) untuk menentukan pilihan strategi prioritas. Berdasarkan total nilai dari *causatif* dan *effect* dari analisis LFA disimpulkan 7 permasalahan utama dari 19 isu permasalahan dalam peningkatan ekonomi wilayah perbatasan, yaitu: (1) produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang rendah; (2) lemahnya peran kelembagaan ekonomi; (3) pasokan BBM tidak lancar dan mahal harganya; (4) maraknya *illegal fishing*; (5) ketergantungan perekonomian terhadap negara luar; (6) dukungan penyediaan input produksi berupa benih dan pakan yang kurang dan (7) kurangnya frekuensi angkutan laut. Berdasarkan analisis SWOT dan QSPM, dirumuskan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan yaitu, *pertama*: Untuk mendukung peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya pemerintah setidaknya membangun 1 SPDN dan 1 BBI di masing-masing wilayah tersebut. *Kedua*: Pemberian bantuan modal untuk peningkatan usaha penangkapan minimal Rp 77 juta sampai dengan Rp 200 juta dan Rp 60 juta untuk usaha budidaya. *Ketiga*: Pemerintah minimal menyediakan 25 tenaga pendamping untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan kualitas nelayan, pembudidaya, dan pengolahan perikanan. *Keempat*: Pemerintah harus merealisasikan 180 hari pengawasan dimana selama ini jumlah hari pengawas baru terealisasi 100 hari per tahun.

Kata kunci: Peningkatan ekonomi, wilayah perbatasan, strategi, nelayan.

Silvia Kristanti Tri Febriana (Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia)

Dwi Nurrahmah (Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia)

Emma Yuniarrahmah (Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESISTENSI PSIKOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN DI KALANGAN PENDULANG INTAN TRADISIONAL DI CEMPAKA, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, Desember 2013, hlm: 279 - 290.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi psikologis terhadap perubahan mata pencaharian di kalangan pendulang intan di Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Subjek penelitian ini berjumlah 31 orang dengan rentang usia antara 18-50 tahun yang dipilih secara purposive sampling. Instrumen penelitian terdiri dari skala kepercayaan diri, persepsi, dan skala resistensi psikologis. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap resistensi psikologis ($\mu=2,9$). Sedangkan persepsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya resistensi psikologis pendulang intan pada perubahan mata pencaharian mereka ($\mu= 59,6$). Jadi, penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi adalah variabel paling signifikan yang mempengaruhi resistensi psikologis terhadap perubahan mata pencaharian di kalangan pendulang intan tradisional.

Kata kunci: Resistensi psikologis, kepercayaan diri, persepsi.

Nini Kusrini (Mahasiswa Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor)

Siti Amanah (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor)

Anna Fatchiya (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor)

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH DI TELUKNAGA, TANGERANG, BANTEN

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, Desember 2013, hlm: 289 - 302.

Abstrak

Masyarakat pesisir telah mengalami kerusakan sumber daya alam, perubahan iklim, dan risiko bencana. Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya telah mengembangkan berbagai program untuk memperbaiki kondisi wilayah pesisir. Salah satu programnya adalah Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang telah diluncurkan sejak tahun 2011. Pada tahun 2012, program ini dilaksanakan di 48 desa di 16 kabupaten. Keberhasilan program ini tergantung pada respon masyarakat termasuk sikap masyarakat. Penelitian tentang sikap masyarakat terhadap program ini, dilaksanakan di dua desa terpilih di Kabupaten Tangerang. Populasi berjumlah 200 yang merupakan masyarakat pemanfaat program. Responden dipilih secara *stratified random sampling* berdasarkan fokus kegiatan PDPT (bina sumber daya, bina infrastruktur dan lingkungan, Bina Usaha, dan bina Siaga bencana). Sampel penelitian sebanyak 60 responden yang diambil dari rumah tangga masyarakat pesisir. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tentang karakteristik individu, karakteristik lingkungan sosial, dan pengelolaan program. Wawancara dan observasi lapangan dilakukan untuk mempelajari sikap masyarakat dan pelaksanaan program. Analisis *rank-Spearman* digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel

yang berhubungan dengan sikap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan karakteristik lingkungan sosial dan tingkat pengelolaan program. Sikap positif masyarakat terhadap program ini dapat ditingkatkan melalui peran tokoh masyarakat, kegiatan program penyuluhan berkelanjutan yang didukung oleh fasilitator lapangan yang kompeten. sikap positif masyarakat terhadap PDPT akan memberikan kontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program.

Kata kunci: Masyarakat pesisir, PDPT, pemberdayaan masyarakat.

Krisnawati (Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian)

Ninuk Purnaningsih (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)

Pang Asngari (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)

PERSEPSI PETANI TERHADAP PERANAN PENYULUH PERTANIAN DI DESA SIDOMULYO DAN MUARI, DISTRIK ORANSBARI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, Desember 2013, hlm: 303 - 314.

Abstrak

Penelitian ini membahas persepsi petani mengenai peranan petugas penyuluh pertanian di Desa Sidomulyo dan Muari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap peranan penyuluh pertanian (teknisi, fasilitator dan advisor). Faktor tersebut meliputi: (1) faktor internal: karakteristik petani (umur, pendidikan formal, pendidikan non-formal, status kepemilikan lahan dan pengalaman berusaha tani) dan (2) faktor eksternal: sistem sosial petani (keterlibatan petani dalam kelompok dan pengetahuan petani terhadap peranan penyuluh pertanian). Responden sebanyak 80 petani yang masih aktif dalam kegiatan penyuluhan. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensial dengan membuat tabel frekuensi dan persentase dan menggunakan uji korelasi Rank Spearman pada taraf kepercayaan 0,05% untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) sebagian besar anggota kelompok tani di Desa Sidomulyo dan Muari Distrik Oransbari masih berada pada usia produktif masa bekerja yaitu 35-47 tahun, dengan tingkat pendidikan tamat SLTP, sering mengikuti kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan usaha tani, memiliki pengalaman berusaha tani 10-20 tahun, aktif mengikuti pertemuan rutin kelompok tani, (2) persepsi petani terhadap peranan penyuluh pertanian sebagai teknisi, fasilitator dan advisor dikategorikan baik, (3) ada hubungan antara faktor internal karakteristik petani dan faktor eksternal (sistem sosial) terhadap persepsi petani terhadap peranan penyuluh pertanian sebagai teknisi, fasilitator dan advisor.

Kata kunci: Persepsi, peranan penyuluh pertanian, petani, penyuluh pertanian.

C. Elly Kumari Tjahya Putri (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI)

Sri Yuni Murtiwiidayanti (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI)

IMPLEMENTASI MODEL PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PASCA-KONFLIK SOSIAL DI KOTA AMBON

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, Desember 2013, hlm: 315 - 330.

Abstrak

Anak merupakan harapan atau dambaan bagi setiap orang dalam keluarga, namun dalam kenyataannya, keberadaan anak di lokasi daerah konflik sosial hak-hak anak banyak yang terabaikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mengenai Implementasi Model Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak Pasca-Konflik Sosial di Kota Ambon melalui pembentukan atau pemanfaatan forum perlindungan anak “Lawamena Kota Ambon” sebagai wadah jejaring kerjasama dalam pelayanan kesejahteraan anak. Hasil penelitian disimpulkan bahwa model pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak di Kota Ambon cukup aplikabel meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat serta berbagai instansi yang kompeten dalam menegakkan hak-hak anak. Meskipun demikian, karena secara kelembagaan Forum Lawamena ini belum didukung oleh peraturan daerah yang dapat memberikan legalitas keberadaannya, membuat kegiatannya kurang berjalan lancar. Direkomendasikan perlu meningkatkan kerjasama antara Forum LPA (Lembaga Perlindungan Anak) ‘Lawamena’ sebagai lembaga yang memiliki visi dan misi memberikan perlindungan dengan Pemerintah Daerah setempat serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sehingga diharapkan LPA memiliki keberdayaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Kota Ambon.

Kata kunci: Model pemberdayaan kelembagaan perlindungan anak, anak pasca-konflik, lembaga perlindungan anak.

Wasisto Raharjo Jati (Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL BERBASIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI YOGYAKARTA

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, Desember 2013, hlm: 331 - 344.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi pemberdayaan masyarakat berbasis program PNPM Mandiri di Desa Kadisoka, Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang terjadi dalam program pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan lingkungan sekitarnya sebagai penggerak ekonomi lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini dipilih untuk melihat secara langsung baik secara interaktif maupun partisipatoris di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat berbasis PNPM sudah membantu dalam manajemen ekonomi masyarakat lokal agar lebih terstruktur sehingga dapat memacu pendapatan masyarakat. Namun demikian, permasalahan infrastruktur sendiri masih menjadi hambatan dalam program pemberdayaan masyarakat baik dari modal maupun infrastruktur.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri, minapolitan, desa Kadisoka.

Chatarina Rusmiyati (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kemensos RI)

Eny Hikmawati (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kemensos RI)

SIKAP SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, Desember 2013, hlm: 345 - 366.

Abstrak

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sikap sosial masyarakat terhadap KDRT, berdasar aspek kognitif, afektif dan konatif sebagai bentuk reaksi terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi dalam rumah tangga, juga reaksi terhadap pelaku dan korban serta faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kajian dilakukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan subjek penelitian masyarakat dipilih dari pegawai-karyawan pemerintah dan swasta, tokoh masyarakat dan agama serta aktivis LSM yang peduli pada masalah KDRT, sejumlah 30 orang, dengan tambahan beberapa korban KDRT. Dari analisis deskriptif kualitatif dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mengetahui KDRT sebagaimana tertuang dalam UU tentang Penghapusan KDRT. Meskipun demikian, pengetahuan tentang adanya peraturan tersebut belum diikuti sikap sosial berupa keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan nyata guna mencegah terjadinya KDRT. Hal tersebut karena masih ada perbedaan pemahaman dan sikap sosial dalam menyikapi KDRT. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, LSM, serta media massa untuk melakukan upaya-upaya terpadu dalam rangka mendorong kesamaan pemahaman dan sikap sehingga permasalahan KDRT dapat ditekan. Keterlibatan semua pihak secara terpadu dalam rangka mendorong agar masyarakat memiliki kesamaan pemahaman dan sikap sosial terhadap KDRT, guna mencegah dan menekan terjadinya KDRT.

Kata kunci: *Sikap sosial, masyarakat, rumah tangga, kekerasan domestik, kekerasan dalam rumah tangga.*

SOSIOKONSEPSIA

Journal of Social Welfare Research and Development

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.

Mira (Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)

Akhmad Solihin (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor)

Tajerin (Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)

MARINE AND FISHERIES BASED-STRATEGIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE BORDER REGION (A CASE STUDY IN NANUSA, NATUNA AND NUNUKAN)

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, December 2013, page: 255 - 278.

Abstract

The purpose of this study are to identify problems and strategies for economic development in the border region. The study was conducted in 2012 in Natuna, Nunukan, and Nanusa. This study uses qualitative data collected through Focus Group discussion. This study also uses analysis techniques of LFA (Logical Framework Analysis), SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threa) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix. Based on the LFA analysis concluded 7 major problems in the border region are (1) The low productivity of captured fisheries and aquaculture, (2) the weak role of economic institutions, (3) the difficulty of the fuel supply, (4) the high illegal fishing practices, (5) economic dependence on foreign countries, (6) lack of support for production inputs, (7) the low frequency of sea transport. Based on the SWOT analysis and QSPM, the formulation of strategies for economic development in the border region are, first, Government should build 1 SPDN and 1 BBI at each study site. Second: Government should provide funding Rp77 million to Rp200 million for captured fisheries and Rp60 million for aquaculture. Third: The government must provide a minimum of 25 extension workers to strengthening the capacity of fishermen. Fourth: The government must realize the 180 day monitoring/year.

Keywords: *Economic improvement, border areas, strategies, fihermen.*

Silvia Kristanti Tri Febriana (Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia)

Dwi Nurrachmah (Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia)

Emma Yuniarrahmah (Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia)

FACTORS THAT INFLUENCE PSYCHOLOGICAL RESISTANCE TO LIVELIHOOD CHANGE AMONG TRADITIONAL DIAMOND MINERS IN CEMPAKA, BANJARBARU, SOUTH KALIMANTAN

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, December 2013, page: 279 - 290.

Abstract

This research aims to identify any factors that influence psychological resistance to livelihood change among traditional diamond miners in Cempaka, Banjarbaru, South Kalimantan. The village is located in South Kalimantan Province. Subject of this research is 31 miners in Cempaka Village, aged between 18-50 years old, which has been selected through purposive sampling method. This research uses several instruments such as confidence scale, perception, and psychological resistance scale to obtain data. Regression analysis is used to analyze the data. This research shows that confidence has insignificant influence to miners' psychological resistance to livelihood change ($\mu=2,9$). On the other side, perception is proven to have significant influence to miners' psychological resistance ($\mu=59,6$). Thus, this research concludes that perception is the most significant variable that influence psychological resistance to livelihood change in diamond miners' community.

Keywords: *Psychological resistance, self confidence, perception.*

Nini Kusrini (Mahasiswa Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor)

Siti Amanah (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor)

Anna Fatchiya (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor)

COMMUNITY ATTITUDES TOWARDS RESILIENT COASTAL VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAM IN TELUKNAGA, TANGERANG, BANTEN

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, December 2013, page: 289 - 302.

Abstract

Coastal community has exposed to natural resource degradation, climate change, and disaster risks. The government, civil society organization, and other institutions have developed various programs to improve the situation. One of the program is Coastal Resilient Village Development Program (CRVDP) that has been launched since 2011. In year 2012, the program was implemented in 48 villages in 16 districts. The success of the program depends on the community responses include the attitude of the community. To research the attitude of the community to the program, two villages in Tangerang District were chosen. The population of the program beneficiaries was 200 households. A stratified random sampling based on the focused activity of CRVDP (resources improvement, infrastructure and environmental development, business development, and disaster risks management) was used to select the respondents. A number of the sample were 60 households. A questionnaire consisted of questions about individual characteristics, social environmental characteristics, and program management was used to gathered data. Interviews and field observation were conducted to learn the community attitude and program implementation. Rank-Spearman Analysis was used to analyse the correlation amongst the variables related to the community attitude. The results show that community attitude has a significant positive correlation with socio environmental characteristics and program

management. Community positive attitude to the program can be improved through the role of community leaders, continual extension program activities supported by competent field facilitators. Positive attitude community to the CRVDP will contribute to the success program implementation.

Keywords: Coastal communities, CRVDP, community empowerment.

Krisnawati (Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian)

Ninuk Purnaningsih (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)

Pang Asngari (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)

FARMER'S PERCEPTION OF THE ROLE AGRI-EXTENSIONWORKER IN SIDOMULYO AND MUARI VILLAGE, ORANSBARI SUB-DISTRICT, SOUTH OF MANOKWARI

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, December 2013, page: 303 - 314.

Abstract

This research is on farmers perception of the role agri-extensionworker in Sidomulyo dan Muari Village, Oransbari Sub District, south of Manokwari, West Papua. The purpose of this research is to analyzed that influence farmers's perceptions of the role extensionworker (technician, facilitator and advisor). These factors include: (1) internal factors: the characteristics of farmers (age, formal education, non formal education, land ownership and farming experience) and (2) external factors: the social system (farmer involvement in the group and knowledge farmers of the role extensionworker) includes two sample villages in District Oransbari South Manokwari of West Papua by 80 respondents farmers who are still active in outreach activities. Data were analyzed with descriptive and inferential create frequency tables and percentages and using the Spearman rank correlation test at the level of 0.05 % to see the level of relationship between the independent variables . The results showed that (1) most of the members of farmer groups in the village and Muari Sidomulyo Oransbari District is still in the working age period 35-47 years, with the level of education completed junior high school, often following training activities, internships, field trips related to agricultural extension activities, has a wide enough area 600-1000 m2, have 10-20 years of experience trying to farm, actively participates in regular meetings of relating to agricultural extension activities, (2) farmer's perceptions of the role extensionworker as a technician, facilitator and advisor categorized good, (3) there is a relationship between internal factors and external factors farmer characteristics (social systems) on farmer's perceptions of the role extensionworker as a technician, facilitator and advisor.

Keywords: Perception, the role of agri-extensionworker, farmer, the extensionworker.

C. Elly Kumari Tjahya Putri (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI)

Sri Yuni Murtiwiidayanti (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI)

THE IMPLEMENTATION ON EMPOWERMENT MODEL OF CHILD PROTECTION AGENCIES POST-SOCIAL CONFLICT IN AMBON CITY

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, December 2013, page: 315 - 330.

Abstract

Children are the hope for everyone in the family, but the existence of social conflict, like that happened in Ambon city, make children's rights much neglected. It calls for the need for research studies regarding

the implementation of the Child Protection Agency's empowerment Model, in the area of social conflict. This research is aimed at implementation a model of empowerment of the Child Protection Agency in the service of child welfare through the establishment or utilization of child protection forum 'Lawamena' in Ambon city as the network cooperation hub. From the results of the study it was concluded that the child protection agency's empowerment model in Ambon city was quite applicable to increase the awareness and participation of the public and various competent agencies in enforcing the rights of the child. The existence of institutional Forum Lawamena, however, has not been legally back up by local regulations that its activities could not be in full swing. It is thus recommended the need for improving cooperation among disputing parties. Partnership between Forum LPA (Child Protection Institutions) 'Lawamena' and local governments plus various parties is expected to empower LPA more in providing protection for children in Ambon city.

Keywords: *Empowerment model of institutional child protection, post-conflict children, child protection agency.*

Wasisto Raharjo Jati (Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

AN ANALYSIS OF SOCIETY EMPOWERING BASED ON NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT (PNPM) MANDIRI POLICY IN YOGYAKARTA

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, December 2013, hlm: 331 - 344.

Abstract

This paper aims to elaborate the implementation of people empowerment based on PNPM Mandiri in Kadisoka village, Sleman regency. The purpose of this study is to analyze the problems that occurred in the empowering development program utilizing their environment as a machine of the local economy. The research method used in this research is case study. This method was chosen to see directly towards interactive and participatory in the research field. The results showed that people empowerment based on PNPM Mandiri has helped in the economic management of local communities to be more structured so as to boost incomes. However, the problem of infrastructure is a major obstacle in both community empowerment program of capital and infrastructure.

Keywords: *Community development, PNPM Mandiri, minapolitan, Kadisoka village.*

Chatarina Rusmiyati (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kemensos RI)

Eny Hikmawati (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kemensos RI)

SOCIETY'S SOCIAL ATTITUDES IN THE CITY OF PONTIANAK TOWARDS DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE

SOSIOKONSEPSIA, Vol. 18, No. 3, December 2013, page: 345 - 366.

Abstract

This study is conducted to understand the society's social attitudes towards physical, psychological, sexual and economy-driven domestic or family violence, also their respons-opinions toboth the actor(s) and the victim(s) and also the causative factor towards the act of domestic or family violence. The study is conducted in the city of Pontianak, West Kalimantan Province with 30 respondents choosed among government-private company's employees, society-religious figures and NGO's activists that concern on domestic violence matter; and in addition, the victim of the domestic violence itself. From the qualitative descriptive analysis, it can be concluded that the society has already possessed an understanding about domestic violence as it is stipulated in the Government Law on Abolition of the Domestic Violence. Eventhough the society has already understood the matter but they haven't been supported by social attitude in the form of bravery to conduct real actions in order to prevent domestic violence, and this research argues that it is merely because of the existence of differences in understanding and in social attitude in dealing with domestic violence. It is recommended to the Social Ministry through Social Institution and Family Empowerment Directorate and the respective Institutions like the Ministry of Children Protection and Women Empowerment, the Ministry of Law and Human Rights, the Police, the Ministry of Health, NGO's, and also the mass media to do all integrated efforts in the context of driving a united social understanding and attitude towards domestic in order to prevent and to reduce the happening of domestic violence.

Keywords: Social attitude, society, family, domestic violence, family violence

